

EFEKTIFITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN NENANG KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA¹

Septian dwi putra²

Abstrak

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan (SPP), kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah.

Terkait dengan Program SPP di Kelurahan Nenang Menunjukkan bahwa program SPP masih belum efektif hal ini dapat terlihat bahwa program ini belum mencapai sasaran secara maksimal, masih adanya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sasaran SPP belum bisa mengikuti program dikarenakan mereka tidak mempunyai usaha, selain itu masih ditemukan banyak penyimpangan pemanfaat dana yang mengakibatkan tidak mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai contoh adanya beberapa pemanfaat yang menggunakan dana SPP untuk keperluan sehari – hari. Dan juga masih terdapatnya kelompok yang tidak atau jarang mengikuti pertemuan rutin kelompok yang biasa mereka lakukan satu bulan sekali dikarenakan kesibukan masing – masing kelompok. Meski demikian upaya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut telah membawa perubahan yang berarti yaitu menjadikan masyarakat lebih mandiri, dan juga ada masyarakat yang mengalami perubahan kearah yang lebih baik meskipun hal itu belum berhasil secara optimal.

Kata Kunci: Program PNPM, Pemberdayaan Perempuan, Penajam Paser Utara.

¹ Materi dari artikel ini berasal dari artikel yang ditulis oleh Septian (mahasiswa Prodi IP Fisip Unmul) di ejournal.ip.fisip.unmul.

² Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: seiptian@gmail.com.

Pendahuluan

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan

Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri sudah banyak program-program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan, seperti pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Hingga saat ini bangsa Indonesia juga belum benar-benar terlepas dari kemiskinan sejak krisis berkepanjangan. Disamping itu, terlepas dari kemiskinan merupakan bagaikan mimpi surga, karena kemiskinan tidak dapat dihilangkan, namun hanya dapat dikurangi. Oleh karena itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sebagai prioritas mendesak, khususnya terhadap masyarakat pedesaan. Salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu program SPP. SPP adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan dalam bentuk dana simpan pinjam, bagi mereka yang telah mempunyai usaha. Secara umum kegiatan SPP ini bertujuan untuk mengembangkan potensi usaha masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) khususnya perempuan.

Dikelurahan Nenang, Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun yang dimulai pada tahun 2009. Dikelurahan Nenang khususnya para ibu – ibu rumah tangga/kaum perempuan biasanya menambah penghasilan buat pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari dengan cara berdagang kecil – kecilan. Untuk usaha tersebut Masyarakat setempat biasanya meminjam pada bank atau koperasi sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik. Selain itu terkadang masyarakat susah mendapatkan dana pinjaman dikarenakan ada beberapa bank atau koperasi yang mengharuskan mereka memenuhi menyerahkan jaminan sebelum meminjam, misalkan saja kartu/sertifikat tanah atau lain sebagainya. Disatu sisi mereka tidak memiliki apa – apa untuk digunakan sebagai jaminan. Dan juga terkadang bunga yang diberikan kepada calon peminjam cukup besar, ditimbang bunga yang diberikan oleh PNPM khususnya program Simpan Pinjam Perempuan. Dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank, diharapkan Program SPP ini dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan menunjang perekonomian Negara serta mengurangi angka kemiskinan khususnya di kelurahan Nenang.

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih satu bulan, dianalisis dengan analisis kualitatif.

Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut akan dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep. Sebelum memfokuskan bahasan pada pendiskualifikasian tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Konsep Efektifitas

Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur yang sangat penting dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu aktivitas dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan awal yang ditentukan sebelumnya. Jelasnya, bila tujuan atau sasaran tercapai tepat pada waktunya maka program tersebut dikatakan efektif namun sebaliknya jika tujuan tidak tercapai sesuai dengan tujuan awal maka aktivitas atau program tersebut tidak efektif. Efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bias dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.

Menurut Duncan dalam Steers (1986:53) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol ialah :

1. Pencapaian tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Sehubungan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk lebih memperlancar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, perlu mengubah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 28/KEP/MENKO/KESRA/ XI/2006 tentang Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. (Royat, 2007:1).

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak

untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.³ Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengaktifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari SPP adalah :

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Adapun Tujuan dari SPP Berdasarkan TK PNPM-MPd, 2008b yaitu :

1. Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan
2. Kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro
3. Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar
4. Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan
5. Mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja baru.

c. Ketentuan Dasar

1. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
2. Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
3. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
4. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konsep umum pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan masyarakat kita perlu memahami coraknya. Beberapa corak pemberdayaan adalah (Taruna, 2001) (1) Human dignity, mengembangkan martabat, potensi, dan energi manusia; (2) Empowerment, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok; (3) Partisipatoris, dan (4) Adil. Sedang filosofi pemberdayaan masyarakat mencakup (1) menolong diri sendiri (mandiri), (2) senantiasa mencari

dan menemukan solusi bersama, (3) ada pendampingan (secara teknis maupun praktis), (4) demokratis, dan (5) menyuburkan munculnya kepemimpinan lokal.

Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah ketidakadilan gender yang mendorong terpuruknya peran dan posisi perempuan di masyarakat. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menghadirkan ketidakadilan gender. Namun perbedaan gender tersebut justru melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Manifestasi ketidakadilan itu antara lain (1) Marginalisasi karena diskriminasi terhadap pembagian pekerjaan menurut gender, (2) Subordinasi pekerjaan (3) Stereotiping terhadap pekerjaan perempuan, (4) Kekerasan terhadap perempuan, dan (5) Beban kerja yang berlebihan.

Oleh karena itu, ada beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memberdayakan perempuan, yaitu (1) Organisasi dan kepemimpinan yang kuat, (2) Pengetahuan masalah hak asasi perempuan, (3) Menentukan strategi, (4) Kelompok peserta atau pendukung yang besar, dan (5) Komunikasi dan pendidikan. Sementara itu, salah satu upaya dalam memberdayakan sumber daya manusia, khususnya perempuan, adalah melalui penanaman dan penguatan jiwa dan praktek kewirausahaan. Secara umum, ciri dan watak seorang wirausahawan adalah (Kartini, 2001):

1. Memiliki kepercayaan diri dan optimis
2. Berorientasi pada kerja dan hasil
3. Berani mengambil resiko dengan perhitungan yang jelas
4. Memiliki jiwa dan sikap kepemimpinan
5. Memiliki kemampuan kreatif dan inovatif
6. Berorientasi ke masa depan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, dengan dasar penelitian studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Fokus Penelitian

Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan khususnya program SPP, Adapun Tujuan dari SPP Berdasarkan TK PNPM-MPd, 2008b yaitu :

1. Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan
2. Kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro
3. Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar

4. Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan
5. Mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja baru.

Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan pada fokus penelitian maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan

Program ini telah memberikan perubahan yang signifikan dalam hal pengembangan potensi simpan pinjam. Sebagai contoh manfaat yang dirasakan oleh pemanfaat simpan pinjam yaitu dari kelompok BTN jaya yang dulunya mereka tidak pernah membuat/memiliki pembukuan – pembukuan sederhana, namun semenjak mereka mengikuti program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini, mereka telah membuat pembukuan – pembukuan yang digunakan untuk pengelolaan dana bergulir baik itu dalam hal pembayaran iuran atau lain sebagainya.

Dengan pengelolaan yang baik dan benar, maka diharapkan kelompok simpan pinjam tersebut dapat mudah dalam menjalankan/mengelola proses simpan pinjam tersebut. Dalam hal pengelolaan dana bergulir, yang mengharuskan mereka membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yang mana telah disepakati oleh masing – masing kelompok bahwa setiap penyetoran dilakukan pada setiap satu bulan sekali. Maka pembukuan seperti ini sangat berguna agar nantinya setiap anggota merasa adanya ketransparanan dalam satu kelompok, sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam satu kelompok tersebut.

Selain itu pembukuan seperti ini diharapkan mampu terhindar dari tumpang tindis pembayaran yang dilakukan oleh anggota kelompok, misalkan saja jika dalam pembayaran angsuran tidak/lupa dicatat dalam pembukuan, maka dapat dipastikan nantinya akan menimbulkan masalah – masalah, seperti keselisihan paham antara anggota dengan bendahara, di satu sisi anggota merasa sudah membayar angsuran, namun disisi lain bendahara mengatakan belum membayar angsuran, karena dalam proses pembayaran angsuran tersebut bendahara tidak mencatatkan adanya transaksi yang dilakukan anggota kelompok. Hal inilah yang ditakutkan jika dalam proses Simpan pinjam tidak memiliki pembukuan

Kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini telah memberikan kemudahan dalam hal akses pendanaan, misalkan saja dalam program ini tidak memberikan jaminan kepada anggota kelompok, berbeda halnya dengan pihak bank atau lain sebagainya yang biasanya memberikan jaminan terlebih dahulu sebelum mereka dapat meminjam dana tersebut, hal inilah yang biasanya membuat mereka sulit mendapatkan dana pinjaman tersebut untuk modal – modal usaha mereka. Dan juga Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini memberikan bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bank atau lain sebagainya yaitu sebesar 1,5%.

Namun terlepas dari itu terdapat beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa belum puas dengan program yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya program SPP. Karena masyarakat miskin merasa kesulitan dalam mengakses SPP, karena dalam program SPP tersebut terdapat persyaratan-persyaratan yang memberatkan masyarakat miskin, salah satunya adalah persyaratan yang mengharuskan kelompok yang akan meminjam dana SPP tersebut memiliki usaha dasar sendiri, sementara ada beberapa kelompok masyarakat yang berminat melakukan pinjaman dana SPP tersebut tidak mempunyai dasar usaha karena memang mereka memiliki perekonomian dibawah rata-rata

Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar

Program SPP ini telah memberikan bantuan berupa dana bergulir kepada masyarakat yang memiliki usaha, yang nantinya dana tersebut diharapkan dapat memajukan usaha mereka masing – masing. Dalam pelaksanaannya dikelurahan Nenang, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah memiliki dampak positif khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, misalkan saja ibu Nurhaeni salah satu pemanfaat dari kelompok PKK 3 dikelurahan Nenang. Kelompok ini memiliki jumlah anggota sebanyak 21 orang yang diketuai oleh Ibu Amaniah dan Ibu Hasnia sebagai bendahara. Total pinjaman dari kelompok ini yaitu sebesar Rp. 15.000.000. Dari pinjaman mereka itulah khususnya ibu Nurhaeni selaku anggota kelompok beliau bisa memajukan usahanya kearah yang lebih maju atau bisa dikatakan meningkat dan dananya beliau gunakan untuk keperluan akan sosial dasar, misalnya dalam aspek kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal yang layak dihuni serta peningkatan standar hidup yang lebih baik.

Namun terlepas dari itu, masih adanya pemanfaat yang menggunakan dananya untuk keperluan selain usaha atau dalam artian menggunakan dananya untuk keperluan sehari – hari. Contohnya ibu Dasmiah salah satu pemanfaat dikelurahan Nenang, beliau menggunakan dananya untuk keperluan anak – anak sekolah dan keperluan sehari – hari, yang mengakibatkan usaha beliau tidak berjalan dengan baik atau bisa dikatakan tidak produktif, hal inilah yang menjadi kendala dalam pengembalian angsuran, dengan tidak produktifnya usaha mereka maka tidak menutup kemungkinan terjadinya tunggakan – tunggakan kedepannya.

Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan

Dengan adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini partisipasi masyarakat khususnya perempuan/Ibu Rumah Tangga (IRT) lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Mereka sekarang lebih aktif dalam hal pembangunan khususnya dalam hal mengentaskan kemiskinan. Yang dulunya mereka hanya berdiam dirumah dan mengharapkan penghasilan suami, sekarang mereka bisa menghasilkan penghasilan dari usahanya sendiri.

Terkait dengan pelaksanaan di kelurahan Nenang tentang memperkuat kelembagaan kaum perempuan, peneliti mengkhususkan pada kelompok simpan pinjam PKK, disini terlihat bahwa kelompok ini telah melakukan

pertemuan – pertemuan rutin yang dilakukan satu kali dalam sebulan yang dilakukan di kediaman ibu Yulianawati selaku ketua kelompok simpan pinjam PKK. Peretemuan ini dilakukan untuk membahas atau mengevaluasi tentang simpan pinjam yang dilakukan kelompok itu sendiri.

Jadwal rutin pertemuan ini harus dilakukan dengan alasan tetap terjadinya pertemuan dengan pengurus. Selain itu pengurus dan anggota dapat memikirkan bagaimana supaya kelompok dapat terus maju dan berkembang lebih baik lagi.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapatnya anggota yang tidak bisa atau jarang menghadiri pertemuan kelompok yang dilakukan rutin setiap satu bulan sekali, hal ini dikarenakan kesibukan para anggota simpan pinjam ini dalam kesehariannya. Sebagai contoh anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PKK yaitu ibu Suriati yang mendirikan usaha kantin sekolah disalah satu sekolah dikecamatan penajam, beliau kadang kala terkendala menghadiri pertemuan dikarenakan kesehariannya berjualan di sekolah. Hal inilah yang mengakibatkan beliau tidak bisa mengadiri pertemuan kelompok tersebut, karena biasanya pertemuan kelompok tersebut dilakukan pada hari – hari aktif atau bukan dihari libur.

Mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja baru

Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan ini telah dilakukan mulai tahun 2009, dan semenjak program ini dilakukan kondisi kehidupan masyarakat semakin membaik khususnya masyarakat yang ikut program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini. Salah satu kelompok yang menerima dana dari program ini yaitu kelompok BTN Jaya. BTN Jaya terdiri dari 21 anggota yang diketuai oleh ibu Yulianawati dan dibendaharai oleh ibu Hariani, dengan total pinjaman sebesar Rp. 24.000.000 yang dananya dibagikan kesemua anggota kelompok. salah satu anggotanya yang merasakan dananya tersebut ialah ibu mariatun. Beliau menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha warung nasi yang beliau buka sebelum mereka ikut program SPP ini. Beliau sangat merasakan manfaat dari program ini. Program ini dapat membuat beliau memajukan usaha warung nasinya, yang sebelumnya hanya menjual makanan seadanya, namun setelah beliau mengikuti program ini, beliau bisa menjual berbagai jenis makanan.

Terkait dengan itu juga salah satu anggota simpan pinjam tersebut mengaku bahwa terdapat peningkatan penghasilan dari usaha mereka, dari modal tersebut beliau bisa memajukan usahanya, kalah dirata – ratakan penghasilan beliau meningkat sekitar 40 – 50% dari sebelumnya. dan juga beliau sekarang bisa memperkerjakan orang lain, atau dengan kata lain beliau bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.

Kesimpulan

Program PNPM Mandiri Perdesaan khususnya Program SPP di Kelurahan Nenang telah membawa perubahan kearah yang positif, program ini telah memberikan bantuan dana buat kelompok – kelompok yang memiliki usaha, yang nantinya dananya digunakan buat memajukan usaha mereka masing – masing. Namun secara keseluruhan terkait dengan keefektifitas masih belum bisa dikatakan efektif secara sempurna sesuai dengan tujuan dari SPP itu sendiri. Hal ini dapat terlihat bahwa program ini belum mencapai sasaran secara maksimal, masih adanya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sasaran SPP belum bisa mengikuti program dikarenakan mereka tidak mempunyai usaha, selain itu masih ditemukan banyak penyimpangan pemanfaat dana yang mengakibatkan tidak mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai contoh adanya beberapa pemanfaat yang menggunakan dana SPP untuk keperluan sehari – hari dan bukan untuk usaha. Selain itu terkait dengan pertemuan kelompok masih adanya anggota yang jarang atau tidak bisa hadir dikarenakan kesibukan kesehariannya. Dan juga masih terdapatnya kelompok yang tidak atau jarang mengikuti pertemuan rutin kelompok yang biasa mereka lakukan satu bulan sekali dikarenakan kesibukan masing – masing kelompok

Daftar Pustaka

- Buku Petunjuk Teknik Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Edisi Juli 2007.
- Gie, The Liang. 1997. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Handoko, T. Hani. 1996. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Steers, Richard M. 1995. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Sugiono. 2007. *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung. CV. Alfabeta,
- Suyanto, Bagong. 1995. *Perangkap Kemiskinan (Problem dan Pengentasannya)*. Universitas Airlangga Press. Surabaya
- Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tohir Mudjahirin. 2008. *Ekonomi Pembangunan (edisi ketujuh)*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara

Sumber Undang –Undang :

- Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Sumber lain :

- <http://www.pnpm-perdesaan.or.id>(diakses pada 05-12-11)
- <http://www.pnpm-mandiri.org>(diakses pada 05-12-11)
- <http://id.netlog.com/ArifNoer/blog/blogid=5682>(diakses pada 05-12-11)
- <http://wordpress.com/2009/05/01/pengertian-efektivitas/> (diakses pada tanggal 15-3-12)
- <http://www.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 24-07-12)
- <http://www.penajamkab> (diakses pada tanggal 24-7-2012)
- <http://www.bppnfi-reg4.net/index.php/pemberdayaan-perempuan.html>(diakses pada tanggal 25-01-13)